



PROVINSI PAPUA

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA**



Jalan Diponegoro No. 63 Jayapura

Telp. (0967) 537214 – 537215

Website : [papua.bnn.go.id](http://papua.bnn.go.id)

E-Mail : [bnnp\\_papua@bnn.go.id](mailto:bnnp_papua@bnn.go.id)

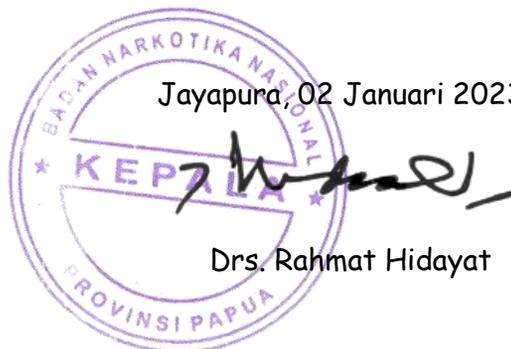
## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat-Nya sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 dengan tepat waktu.

Pelaksanaan tugas, pokok, fungsi dalam implementasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang sekarang direvisi dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2013. Pelaksanaan P4GN di satuan kerja BNNP Papua telah dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi dalam merencanakan dan melaksanakan program P4GN di Provinsi Papua pada tahun selanjutnya agar lebih baik lagi dan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan. Laporan ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja di satker BNNP Papua. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk rekapitulasi data di tingkat nasional untuk pembuatan LAKIP BNN RI dan sebagai bahan penyusunan implementasi rencana kerja dan anggaran di tahun-tahun berikutnya.

Jayapura, 02 Januari 2023



Drs. Rahmat Hidayat

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>EXECUTIVE SUMMARY.....</b>	5
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	11
A. Latar Belakang .....	11
B. Dasar Hukum .....	13
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.....	13
D. Struktur Organisasi .....	17
E. Sistematika Penyajian .....	21
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .....</b>	22
A. Penetapan Kinerja BNNP Papua Tahun 2022 .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	26
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	26
1. Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika .....	27
2. Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika .....	29
3. Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN...	30
4. Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan I .....	31
5. Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan II .....	32
6. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi I .....	34
7. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi II.....	34

8. Meningkatnya Aksebilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika I.....	35
9. Meningkatnya Aksebilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika II.....	36
10. Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi.....	38
11. Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya I.....	39
12. Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya II.....	42
13. Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika I.....	43
14. Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika II.....	44
15. Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien I.....	44
16. Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien II.....	45
17. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur I.....	46
18. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur II.....	47
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>48</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>48</b>
LAMPIRAN 1 Laporan Realisasi Anggaran dan Output BNNP Papua.....	49
LAMPIRAN II Laporan Realisasi Anggaran dan Output BNNK Jayapura.....	50
LAMPIRAN III Laporan Realisasi Anggaran dan Output BNNK Mimika.....	51

## **Executive Summary ( Ikhtisar Eksekutif )**

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah. BNNP Papua berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. BNNP Papua mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Papua.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 64), Badan Narkotika Nasional (BNN) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BNNP Papua melaksanakan tupoksi dan wewenang BNN di daerah Provinsi Papua dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 terdapat 5 (lima) pilar utama dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Untuk mengimplementasikan Program P4GN, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2015-2019. BNNP Papua melaksanakan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut ringkasan singkat capaian dari setiap indikator kinerja utama.

### **Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi**. Target yang diberikan adalah 2 Kabupaten/Kota. Target tersebut telah tercapai 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.

## **Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi**. Target yang diberikan adalah 2 Kabupaten/Kota. Target tersebut telah tercapai sebanyak 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.

## **Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi**. Target yang diberikan adalah 2 Kabupaten/Kota. Target tersebut telah tercapai 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.

## **Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkotika Secara Berkelanjutan**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi yang Beralih Status dari “Bahaya” Menjadi “Waspada” dan Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi**. Target yang diberikan adalah 1 Kawasan. Target tersebut telah tercapai 2 Kawasan Rawan yaitu Kelurahan Imbi dan Kampung Skouw Mabo.

## **Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkotika Secara Berkelanjutan**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi**. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan sebesar 2.51 % (indeks). Lifeskill di Kelurahan Imbi adalah Pembuatan Batu Tela dan lifeskill di Kampung Skouw Mabo adalah Pembuatan Souvenir Batok Kelapa. Nilai Keterpulihan

Kawasan Rawan Yang Diintervensi adalah Kelurahan Imbi sebesar 2.58 % dan Kampung Skouw Mabo sebesar 3.06 %.

#### **Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih**. Target yang diberikan adalah 20 orang untuk jumlah petugas IBM terlatih. Target tersebut telah tercapai 25 orang.

#### **Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Petugas Rehabilitasi yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis**. Target yang diberikan adalah 5 Orang untuk petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis. Target tersebut telah tercapai 8 orang.

#### **Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Wilayah Provinsi**. Target yang diberikan adalah 3 Lembaga. Target tersebut tidak tercapai karena nilai SNI dari 3 Lembaga yang direkomendasikan tidak mencapai standar pelayanan minimal yaitu nilainya "C". Tiga lembaga itu adalah Klinik Amungsa BNNK Mimika, Puskesmas Arso 3 Keerom, dan YP2MP.

#### **Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi**. Target yang diberikan adalah 3 unit dan tercapai 3 unit lokasi IBM yaitu Kelurahan Imbi (Kota Jayapura), Kampung Nolakla (Kabupaten Jayapura), dan Kampung Kadun Jaya (Kabupaten Mimika).

### **Sasaran Kegiatan 10 : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua**. Target yang diberikan adalah 3.00 %. Target tersebut terealisasi sebesar 3.705 dengan nilai interval 92.625 dengan predikat mutu "A" Sangat Baik.

### **Sasaran Kegiatan 11 : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21**. Target yang diberikan adalah 10 berkas P-21. Target tersebut telah tercapai sebesar 14 LKN yang P-21 terdiri dari 8 LKN BNNP Papua, 4 LKN BNNK Mimika dan 2 LKN BNNK Jayapura

### **Sasaran Kegiatan 12 : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang Dimusnahkan**. Target yang diberikan adalah 2 titik lahan ganja dan tercapai 2 lahan ganja yaitu Distrik Wolo dan Brime Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Waris Kabupaten Keerom.

### **Sasaran Kegiatan 13 : Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan**. Target yang diberikan yaitu 100 %. Target tersebut telah tercapai sebesar 100 %.

### **Sasaran Kegiatan 14 : Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika**. Target yang diberikan yaitu 100 % dan Target tersebut telah tercapai sebesar 100 %.

#### **Sasaran Kegiatan 15 : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Papua**. Target yang diberikan yaitu 87 % untuk nilai kinerja BNNP Papua. Untuk BNNP Papua tidak mencapai target yaitu sebesar 70.92 Sedangkan untuk BNNK Jayapura sebesar 63.41 dan BNNK Mimika sebesar 69.48 Kedua BNNK tersebut juga tidak mencapai target yang ditentukan.

#### **Sasaran Kegiatan 16 : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran Mencapai Target**. Untuk tahun ini kedua BNNK yaitu BNNK Jayapura dan BNNK Mimika sama-sama nilai kinerja anggarannya tidak mencapai target sehingga realisasinya 0.

#### **Sasaran Kegiatan 17 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Papua**. Target yang diberikan yaitu 95 % untuk nilai IKPA BNNP Papua. Untuk BNNP Papua telah melebihi target yaitu nilai IKPA nya sebesar 96.87 %.

#### **Sasaran Kegiatan 18 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA Mencapai Target**. Target

yang diberikan yaitu 2 BNN Kabupaten/Kota yang nilai IKPA nya mencapai target. Untuk BNNP Papua telah melebihi target yaitu nilai IKPA nya sebesar 96.87. Sedangkan untuk BNNK Jayapura sebesar 96.10 dan BNNK Mimika sebesar 95.64. Kedua BNNK tersebut juga telah melebihi target yang ditetapkan.

# **BAB**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Provinsi Papua terletak di ujung timur wilayah Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara tetangga yaitu Papua New Guinea. Provinsi Papua terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten/Kota dimana terdapat 5 (lima) kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Hasil penghimpunan informasi dari informan BNNP Papua dapat disimpulkan bahwa cukup banyak peredaran ganja yang masuk ke Provinsi Papua dengan memanfaatkan daerah perbatasan. Peredaran ganja yang tidak dalam pengawasan pemerintah sangat berbahaya bagi generasi muda dan masyarakat Papua. Pemerintah beserta masyarakat harus bergandengan tangan untuk memerangi penyalahgunaan ganja dan jenis narkoba lain yang dapat merusak bangsa. Penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan memperkuat kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penguatan kelembagaan dimaksud adalah pengembangan kelembagaan BNN menjadi instansi vertikal sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). BNNP Papua dibentuk untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan BNN di Provinsi Papua.

BNNP Papua melaksanakan P4GN di Provinsi Papua dengan melakukan pencegahan melalui diseminasi informasi dan advokasi, melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan alternative dan peningkatan peran serta masyarakat,serta rehabilitasi dan program pasca rehabilitasi. Melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

melalui pelaksanaan intelijen berbasis teknologi, penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba alami, penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba sintetis, penyidikan jaringan peredaran gelap psikotropika dan prekursor, pelaksanaan interdiksi wilayah udara, laut, darat dan lintas darat, pelaksanaan penindakan dan pengejaran serta perawatan tahanan, barang bukti, penyidikan dan pengelolaan asset serta bidang hukum dan kerjasama melalui hubungan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri serta melaksanakan penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum.

BNNP Papua tidak dapat melakukan P4GN tanpa melibatkan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di Provinsi Papua . Hal ini sejalan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk melibatkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program P4GN, diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) Tahun 2015-2019. Inpres tersebut menugaskan kepada seluruh pimpinan kementerian/ lembaga/ instansi pusat dan daerah, berperan serta melakukan program P4GN sesuai dengan fungsi yang ada pada kementerian/ lembaga/ instansi masing-masing.

BNNP Papua dalam menjalankan tugasnya menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh sebab itu perlu adanya ketransparansian dalam penggunaannya. Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 BNNP Papua berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP Papua. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 388 Tahun 2015 Tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan BNN Republik Indonesia

## **C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.**

### **1. Kedudukan.**

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN

### **2. Tugas.**

Tugas BNNP Papua adalah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Papua antara lain:

- a. Melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba.
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

### **3. Fungsi.**

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP Papua menyelenggarakan fungsi BNN di Provinsi Papua:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.

- b. Penyusunan, perumusan dan Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP Papua.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama.
- f. Mengikuti pembinaan teknis dibidang P4GN.
- g. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN.
- h. Mengikuti penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba;
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba;
- l. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba.
- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya.
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian Narkoba.
- v. Pengembangan laboratorium uji Narkoba.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

#### **4. Kewenangan.**

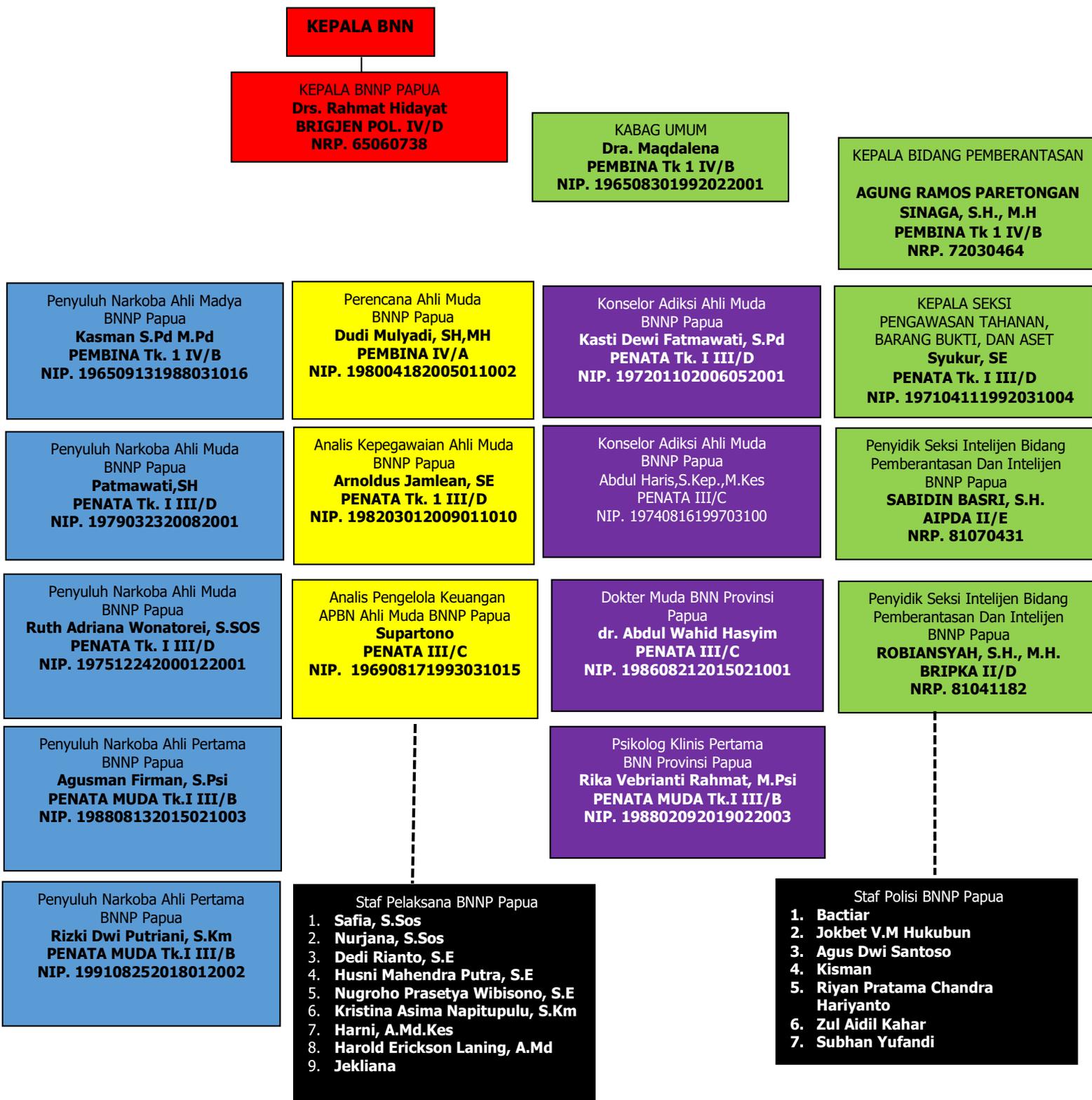
Kewenangan BNNP Papua secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNNP Papua berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah Provinsi Papua.

#### **D. Struktur Organisasi.**

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:

1. Kepala BNNP Papua
2. Kepala Bagian Umum
3. Kepala Bidang Pemberantasan

## STRUKTUR ORGANISASI BNNP PAPUA T.A 2022



## Daftar Nama Pegawai BNN Provinsi Papua Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>N A M A NIP / NRP</b>	<b>PANGKAT/ GOLONGAN</b>	<b>JABATAN/ ESELON</b>	<b>PENDIDIKAN TERAKHIR</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5	6
1	Drs. RAHMAT HIDAYAT 65060738	Brigjen.Pol/ IV-D	Ka. BNNP II.a	S1	L
2	Dra. MAQDALENA 19650830 199202 2 001	Pembina Tk. I/ IV-B	Kabag. Umum III.a	S1 Kessos	P
3	AGUNG RAMOS PARETONGAN SINAGA, S.H., M.H 72030464	Kombes.Pol/ IV-B	Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Papua	S2 Hukum	L
4	KASMAN, S.Pd; M.Pd. 19800519 200212 1 006	Pembina/ IV-A	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP Papua	S2 Pendidikan	L
5	DUDI MULYADI, SH, MH 19800418 200501 1 002	Pembina/ IV-A	Perencana Ahli Muda BNNP Papua	S2 Hukum	L
6	KASTI DEWI FATMAWATI, S.Pd. 19720110 200605 2 001	Penata Tk.1/ III-D	Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Papua	S1. Pendidikan	P
7	PATMAWATI, SH 19790323 200008 2 001	Penata Tk. 1/ III-D	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP Papua	S1. Hukum	P
8	RUTH A. WONATOREI, S.Sos. 19751224 200012 2 001`	Penata/III-C	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP Papua	S1. Sosiologi	P
9	ARNOLDUS JAMLEAN, SE 19820301 200901 1 010	Penata Tk. 1/ III-D	Analisis Kepegawaian Ahli Muda BNNP Papua	S1 Ekonomi	L
10	ABDUL HARIS, S.Kep.,M.Si. 19740816 199703 1 003	Penata/III-C	Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Papua	S2 Kesehatan	L
11	SUPARTONO 19690817 199303 1 015	Penata/III-C	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda BNNP Papua	SLTA	L
12	SAFIA, S.Sos. 19790118 200008 2 001	Penata Tk. 1/ III-D	Analisis Data Dan Informasi BNN Provinsi Papua	S1 Adm.Negara	P
13	SYUKUR, SE 19710411 199203 1 004	Penata Tk. 1/ III-D	Kepala Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	S1 Ekonomi	L
14	NURJANA, S.Sos 19751028 200701 2 020	Penata/III-C	Analisis Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Papua	S1 Sosial	P
15	dr. ABDUL WAHID HASYIM 19860821 201502 1 001	Penata/III-C	Dokter Muda BNN Provinsi Papua	S1 Kedokteran	L
16	DEDI RIANTO, SE 19900603 201502 1 002	Penata Muda Tk./III-B	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan BNN Provinsi Papua	S1. Ekonomi	L
17	AGUSMAN FIRMAN, S.Psi. 19880813 201502 1 003	Penata Muda Tk./III-B	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Provinsi Papua	S1. Psikologi	L
18	RIZKI DWI PUTRIANI, S.KM 19910825 201801 2 002	Penata Muda/ III-B	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Provinsi Papua	S1 Kesehatan Masyarakat	P

19	RIKA VEBRIANTI RAHMAT, M.Psi 19880209 201902 2 003	Penata Muda Tk.I/III-B	Psikolog Klinis Pertama BNN Provinsi Papua	S2 Psikologi	P
20	HUSNI MAHENDRA PUTRA, SE 19910808 202012 1 008	Penata Muda/ III-A	Pengelola Keuangan BNN Provinsi Papua	S1 Ekonomi	L
21	NUGROHO P.WIBISONO, A.Md 19920723 201502 1 001	Pengatur TK. I/ II-D	Pengelola Keuangan BNN Provinsi Papua	D3. Manajemen Informatika	L
22	HARNI, A.Md.Kes	Penata Muda / III-A	Pengelola Data Bagian Umum BNN Provinsi Papua	S1 Kesehatan	P
23	KRISTINA ASIMA NAPITUPULU, S.KM	Penata Muda / III-A	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial BNN Provinsi Papua	S1 Kesehatan	P
24	HAROLD ERICKSON LANING, A.Md	Pengatur TK. I/ II-D	Pengelola Data Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	D3 Farmasi	L
25	JEKLIANA 19881024 201104 2001	Pengatur /II-C	Pengadministrasi Umum Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SMA	P
26	SABIDIN BASRI, SH 81070431	Aipda/ II-E	Penyidik Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	S1. Hukum	L
27	BACHTIAR 78011039	Bripka/ II-D	Petugas Pengejaran Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
28	JOKBET V.M. HUKUBUN 84100861	Bripka/ II-D	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	P
29	ROBIANSYAH, S.Sos. I 81041182	Brigpol/ II-C	Penyidik Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	S1. Sosial Islam	L
30	KISMAN 87040073	Bripka/ II-D	Petugas Pengejaran Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
31	AGUS DWI SANTOSO 92080569	Briptu/II-B	Petugas Pengejaran Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
32	RIYAN PRATAMA CHANDRA HARIYANTO 98110180	Bripda/II-A	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
33	SUBHAN YUFANDI 97030459	Bripda/II-A	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan	SLTA	L

			Intelijen BNN Provinsi Papua		
34	ZUL AIDIL KAHAR 98040305	Bripda/II-A	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L

#### **E. Sistematika Penyajian.**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibidang Pencegahan P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I     Pendahuluan.

Bab II    Perencanaan dan Penetapan Kinerja.

Bab III   Akuntabilitas Kinerja

Bab IV    Penutup.

Lampiran-Lampiran.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Penyusunan perjanjian kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PK adalah wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrument dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Pihak pihak yang melaksanakan PK meliputi Pimpinan Kementerian/ Lembaga, Pimpinan Unit Organisasi mulai eselon I, II, III, dan IV, Pimpinan Satuan Kerja Vertikal, Pimpinan Unit Kerja Mandiri hingga level individu yang menjadi anggota organisasi. Dokumen PK terdiri dari Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Pernyataan perjanjian kinerja terdiri dari pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu yang ditandatangani pihak yang berjanji / sepakat, sedangkan Lampiran Perjanjian Kinerja berisi informasi kinerja yang diperjanjikan terdiri atas variabel sasaran, indikator, dan target. Variabel dalam Lampiran PK inilah yang menjadi sumber acuan dalam konteks penyusunan LKIP setiap unit organisasi.

Visi misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

**Visi Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua :**

***“Mewujudkan masyarakat Provinsi Papua yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.”***

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua menetapkan misi Organisasi sebagai berikut :

**Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua :**

***“Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Provinsi Papua dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”.***

## A. Penetapan Kinerja BNNP Papua Tahun 2022

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Adapun Penetapan Kinerja/Perjanjian Kerja BNNP Papua Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini :

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori "Tinggi" Di Wilayah Provinsi	2	Kabupaten/Kota
Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori "Tinggi" Di Wilayah Provinsi.	2	Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	2	Kabupaten/Kota
Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi yang Beralih Status dari "Bahaya" Menjadi "Waspada"	1	Kawasan
Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi	2.51	Indeks

Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih.	20	Orang
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	5	Orang
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Wilayah Provinsi	3	Lembaga
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	3	Unit
Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua	3.00	Indeks
Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21	10	Berkas
Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang Dimusnahkan	2	Titik Lahan
Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	Indeks
Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika.	100	Indeks
Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Papua	87	Indeks
Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran Mencapai Target	2	BNN Kabupaten/Kota

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Papua	95	%
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA Mencapai Target	2	BNN Kabupaten/Kota

**DIPA BNNP PAPUA T.A 2022**

No.	Kode Output	Indikator Output	Pagu
1	3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	26.488.000
2	3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	60.000.000
3	3248.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	160.435.000
4	3251.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	50.000.000
5	3256.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	29.150.000
6	3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	243.880.000
7	3258.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	114.125.000
8	3258.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	54.100.000
9	3258.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	142.125.000
10	3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	26.811.000
11	3259.ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	266.260.000
12	3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	107.600.000
13	3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	121.891.000
14	3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.596.248.000
15	3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	40.205.000
16	3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	53.440.000
17	3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	77.544.000
18	3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.192.859.000
19	3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	45.000.000
20	5936.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	141.565.000
21	5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	627.458.000
22	5354.QHB	Operasi Bidang Keamanan	450.000.000
<b>Jumlah Total</b>			<b>7.627.184.000</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2022 BNNP Papua telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 18 (delapan belas) sasaran kinerja / kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 18 (delapan belas).

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Papua selama kurun waktu tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNNP Papua Tahun 2022, BNNP Papua akan menggunakan data hasil survei kerjasama antara Puslitdatin BNN dan Puslitkes Universitas Indonesia, namun dalam penyajian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah data / hasil survey belum kami terima, data tersebut kami harap segera kami terima sebagai dasar perhitungan untuk menentukan prosentase capaian dengan pertimbangan karakteristik daerah yang menjadi lokasi monitoring memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan telah aktif melakukan program P4GN. Hasil perumusan atas pelaksanaan survei tersebut dijadikan sebagai data pembanding dalam evaluasi capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja utama program P4GN dengan uraian sebagai berikut :

# 1

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

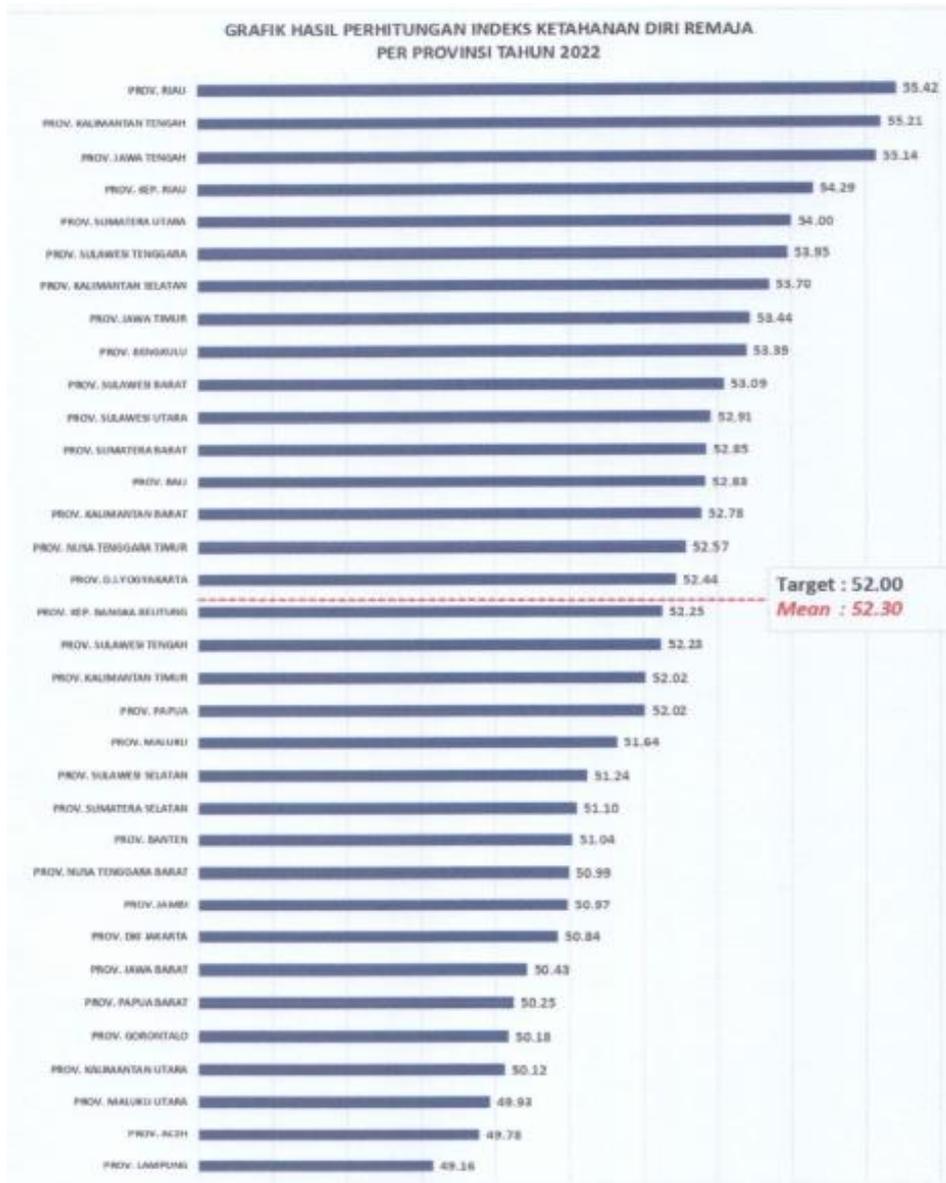
Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten /Kota	100 %

Untuk Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi Papua, tahun 2022 ini mendapatkan target 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mimika. Nilai Deklara kedua Kabupaten tersebut berkategori tinggi dengan nilai sebagai berikut :

33	<b>BNNP PAPUA</b>	53.76	52.68	Tinggi
	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.39	51.67	Tinggi
	BNN KABUPATEN JAYAPURA	51.83	51.69	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. PAPUA</b>	<b>52.33</b>	<b>52.02</b>	<b>Tinggi</b>

Secara nasional BNNP Papua mendapatkan peringkat 20 nilai Deklara dari 34 provinsi dengan nilai agregate 52.02. Tabel ini menunjukkan bahwa tahun 2022 BNNP Papua dan jajarannya ada penurunan nilai Deklara yang di tahun 2021 mempunyai skor nilai 52.33. Secara nasional juga BNNP Papua dan jajarannya tidak masuk dalam target nasional yaitu minimal sebesar 52.30. Berikut grafik hasil perhitungan indeks ketahanan diri remaja per provinsi tahun 2022 :



# 2

## Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

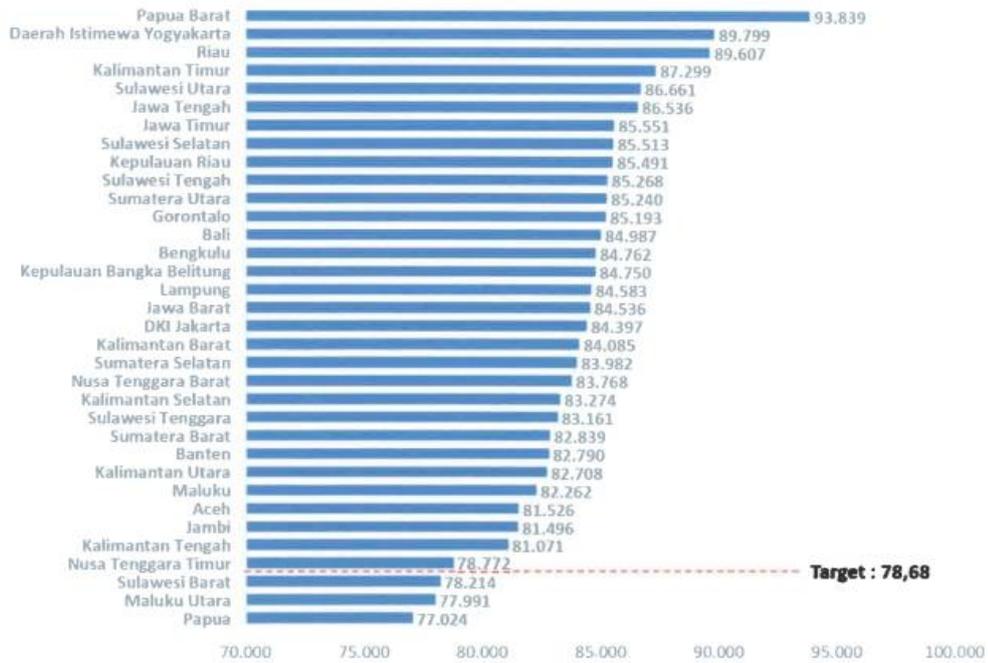
Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah *Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi.	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	100 %

No.	Satuan Kerja	Nilai Dektara	Kategori
1.	BNNP Papua	69.464	RENDAH
2.	BNNK Jayapura	82.679	TINGGI
3.	BNNK Mimika	78.929	TINGGI

Dari tabel di atas, terlihat indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika di Provinsi Papua tahun 2022 dikategorikan “rendah” dengan nilai akumulasi 69.464 (Rendah). Tetapi terlihat indeks 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura dengan nilai 82.679 (Tinggi) dan Kabupaten Mimika dengan nilai 78.929 (Tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Papua secara agregat tingkat kesadaran akan bahaya narkotika dilingkungan keluarga masih rendah. Artinya outcome dari kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan BNNP Papua, BNNK Jayapura dan BNNK Mimika kepada masyarakat masih harus ditingkatkan lagi. Berikut grafik perhitungan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika (DEKTARA) per provinsi di Indonesia tahun 2022 :

**GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2022**



**3**

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi . Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100 %

<b>JUMLAH PENGGIAT &amp; INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP)</b>				
<b>NO</b>	<b>SATKER</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NILAI IKP</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	BNNP PAPUA	30 ORANG	3,20	- Lingkungan Pemerintah - Lingkungan Masyarakat
2.	BNNK JAYAPURA	90 ORANG	3,21	- Lingkungan Pemerintah - Lingkungan Swasta - Lingkungan Pendidikan - Lingkungan Masyarakat
3.	BNNK MIMIKA	20 ORANG	3,30	- Lingkungan Pendidikan - Lingkungan Masyarakat
<b>JUMLAH</b>		<b>140 ORANG</b>	<b>3,23</b>	<b>MANDIRI</b>

4	<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan</b>
---	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi yang Beralih Status dari “Bahaya” Menjadi “Waspada” dan Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>T a r g e t</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Target (%)</b>
1.	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi yang Beralih Status dari “Bahaya” Menjadi “Waspada”	1 Kawasan	2 Kawasan	100 %

<b>NO</b>	<b>KAWASAN YANG DIINTERVENSI</b>	<b>JENIS PELATIHAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Kampung Skouw Mabo	Pembuatan Souvenir Batok Kelapa	15 Orang
2.	Kelurahan Imbi	Pembuatan Batu Tela	15 Orang

Untuk kawasan rawan di wilayah Provinsi Papua yang beralih status dari “Bahaya” Menjadi “Waspada” adalah Wilayah Kampung Skouw Mabo dan Kelurahan Imbi. Dengan lifeskill atau jenis pelatihan di Kampung Skouw Mabo adalah Pembuatan Souvenir Batok Kelapa dan lifeskill di Kelurahan Imbi adalah Pembuatan Batu Tela. Berikut rinciannya :

Jumlah Kawasan/Wilayah Rawan Narkoba yang Diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif					
Satker	Nama Kawasan	Jenis Lifeskill	Faktor Pokok	Faktor Pendukung	Keterangan
BNNP Papua	Kampung Skouw Mabo	Pembuatan Souvenir Batok Kelapa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Kejahatan Tinggi</li> <li>2. Angka Pengguna Narkoba</li> <li>3. Barang Bukti Narkoba</li> <li>4. Kurir Narkoba</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hunian dengan privacy tinggi</li> <li>2. Ketiadaan sarana publik</li> <li>3. Rendahnya interaksi sosial masyarakat</li> </ol>	Kota Jayapura

Jumlah Kawasan/Wilayah Rawan Narkoba yang Diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif					
Satker	Nama Kawasan	Jenis Lifeskill	Faktor Pokok	Faktor Pendukung	Keterangan
BNNP Papua	Kelurahan Imbi	Pembuatan Batu Tela	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Angka Kejahatan Tinggi</li> <li>6. Angka Pengguna Narkoba</li> <li>7. Barang Bukti Narkoba</li> <li>8. Kurir Narkoba</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Hunian dengan privacy tinggi</li> <li>5. Ketiadaan sarana publik</li> <li>6. Rendahnya interaksi sosial masyarakat</li> </ol>	Kota Jayapura

<b>5</b>	<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan</b>
----------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi	2.51 %	2.58	102.7 %

Nilai yang menjadi patokan adalah kawasan rawan yang diintervensi di wilayah Kelurahan Imbi saja karena murni dari DIPA BNN Provinsi Papua tahun 2022. Untuk kawasan rawan di Kampung Skouw Mabo tidak dihitung karena merupakan bantuan Hibah dari PT. PLN (Persero).

<b>KAWASAN RAWAN YANG DIINTERVENSI</b>										
NO	KAWASAN YANG DIINTERVENSI	JENIS PELATIHAN	JUMLAH	HASIL SKM		NILAI KEWIRAUSAHAAN		IKKR		KET
				NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	
1.	Kampung Skouw Mabo	Pembuatan Souvenir Batok Kelapa	15 Orang	3,06	Baik	2,81	Baik	3,06	Siaga	HIBAH
2.	Kelurahan Imbi	Pembuatan Batu Tela	15 Orang	2,82	Baik	2,67	Baik	2,58	Siaga	DIPA

<b>Data Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Provinsi Papua Tahun 2022</b>					
No.	Nama Satker	Nama Kawasan	Status Kerawanan	Nilai IKKR	Kategori Keterpulihan
1.	BNNP Papua	Kampung Skouw Mabo	Waspada	3.06	Siaga
2.	BNNP Papua	Kelurahan Imbi	Waspada	2.58	Siaga

# 6

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih*. Sasaran di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih.	20 Orang	25 Orang	125 %

Untuk *Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih*, sesuai PK 2022 BNNP Papua mendapatkan target 20 orang. Dari target tersebut BNNP Papua mampu mencapai angka yang melebihi target yaitu mendapatkan 25 orang petugas penyelenggara layanan IBM atau yang disebut para Agen Pemulihan. Para AP ini yang nantinya ditunjuk dan diundang mengikuti pembekalan pelatihan peningkatan kemampuan petugas sehingga menjadi petugas IBM yang terlatih. Capaian target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 125 %. Faktor pendukung mengapa jumlah petugas layanan IBM yang terlatih ini bisa melebihi target sudah dibukanya PPKM dan normalisasi kebijakan terkait Covid-19 di Provinsi Papua.

# 7

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Petugas Rehabilitasi yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Petugas Rehabilitasi yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	5 Orang	8 Orang	160 %

Untuk *Jumlah Petugas Rehabilitasi yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis* sesuai PK 2022 BNNP Papua mendapatkan target 5 orang. Dari target tersebut BNNP Papua mampu mendapatkan 8 orang petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis. Capaian target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 160 %. Alasan faktor yang membuat kita over prestasi atau melebihi target karena puskesmas dan rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan Bidang Rehabilitasi BNNP Papua sangat mendukung rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba. Puskesmas dan Rumah Sakit yang menjadi mitra BNNP juga antusias mengirimkan tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk menangani korban penyalahguna narkoba di masyarakat untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi teknis bagi petugas rehabilitasi.

8	<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan</b>
---	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah *Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Wilayah Provinsi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Wilayah Provinsi	3 Lembaga	0	0

Untuk Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Wilayah Provinsi Papua sesuai PK 2022 BNNP Papua mendapatkan target 3 lembaga.

Dari target tersebut BNNP Papua tidak mampu mendapatkan target 3 lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena nilainya dibawah SNI dan berpredikat “C” (CUKUP). Tiga Lembaga tersebut adalah :

No.	Lembaga Rehabilitasi Yang Direkomendasikan	Predikat Nilai SPM
1.	Klinik Amungsa BNNK Mimika	C
2.	Puskesmas Arso 3 Keerom	C
3.	YP2MP	C

<b>9</b>	<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan</b>
----------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	3 Unit	3 Unit	100 %

Untuk *Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi Papua* sesuai PK 2022 BNNP Papua mendapatkan target 3 unit. Capaian target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

No.	Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi Papua	Satker Pelaksana
1.	Kelurahan Imbi	BNNP Papua
2.	Kampung Nolakla	BNNK Jayapura
3.	Kampung Kadun Jaya	BNNK Mimika

Faktor pendorong IBM terbentuk di Kelurahan Imbi yaitu tidak lepas dari dukungan pemerintah Kelurahan Imbi. Pemerintah Kelurahan Imbi bersedia untuk menganggarkan dana untuk dialokasikan ke kampung Intervensi Berbasis Masyarakat hingga IBM Kelurahan Imbi bisa berdiri. Adapun untuk IBM di BNNK Jayapura terbentuk di Kampung Nolakla, faktor pendorongnya adalah :

- Adanya dukungan dari Aparat Pemerintah Kampung
- Dukungan dari Pemerintah Distrik dan Kabupaten dengan adanya pengakuan anggaran yang disampaikan dalam pertemuan koordinasi pembentukan IBM
- Adanya dukungan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda yang ada di Kampung Nolakla.

Sedangkan hambatannya adalah :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya pecandu/penyalahguna narkoba untuk melaporkan diri
- Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana IBM masih kurang
- Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan IBM di Kampung.

Adapun untuk IBM di BNNK Mimika terbentuk di Kampung Kadun Jaya faktor pendorongnya adalah :

- adanya dukungan dari perangkat desa mengenai program IBM ini
- Kepala kelurahan bahkan menjadi pembina secara langsung dalam menjalankan program IBM di Kelurahan Kadun Jaya

- Apresiasi dari warga dan besarnya kepedulian terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan tersebut sehingga program IBM dikelurahan Kadun Jaya dapat terbentuk dan berjalan dengan baik sejauh ini

Sedangkan hambatannya adalah :

- Tidak terpenuhinya anggaran untuk menjalankan kegiatan IBM sesuai target yg ditetapkan

<b>10</b>	<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi</b>
-----------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya *adalah Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

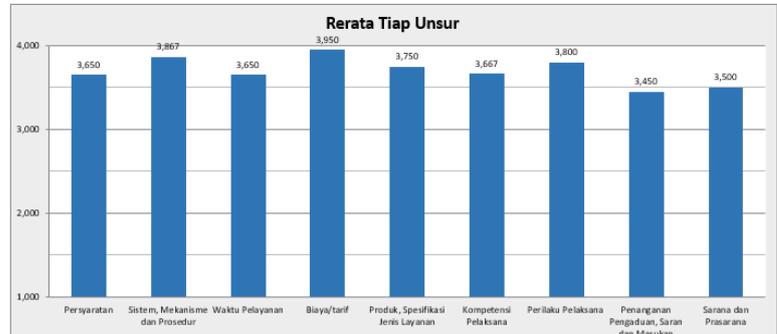
No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua	3.00 %	3.705 %	123.5 %

Untuk *Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua* sesuai PK 2022 BNNP Papua mendapatkan target 3.00 %. Dari target tersebut BNNP Papua mampu mendapatkan nilai sebesar 3.705 % dengan predikat mutu “A” (sangat baik). Capaian target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 123.5 %.

## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2022 Semester I: Rawat Jalan

No. Urut	Persyaratan		Sistem, Mekanisme dan Prosedur			Waktu Pelayanan		Biaya/tarif		Produk, Spesifikasi Jenis Layanan		Kompetensi Pelaksana			Perilaku Pelaksana		Peningkatan Pengaduan, Saran dan Masukan		Sarana dan Prasarana	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sektor Total	35	38	39	38	39	36	37	39	40	39	36	38	36	36	37	39	34	35	37	33
Rata-rata	3,500	3,800	3,900	3,800	3,900	3,600	3,700	3,900	4,000	3,900	3,600	3,800	3,600	3,600	3,700	3,900	3,400	3,500	3,700	3,300
Rerata Tiap Unsur	3,650		3,867			3,650		3,950		3,750		3,667			3,800		3,450		3,500	
IKM	3,705																			
IKM	92,625																			

Nilai Interval dan Nilai Interval Konversi IKM			
Nilai Interval (25 - 100)	Nilai Interval (1 - 4)	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
88,31 - 100,00	3,533 - 4,00	A	Sangat baik
76,61 - 88,30	3,065 - 3,532	B	Baik
65,00 - 76,60	2,600 - 3,064	C	Kurang baik
25,00 - 64,99	1,000 - 2,599	D	Tidak baik



No.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Satker	IKM	Skala 4	Kategori
1.	Klinik Cenderawasih	BNNP Papua	92.625	3.705	A

11

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21*. Sasaran di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21	10 Berkas	14 Berkas	150 %

Untuk *Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21* sesuai PK 2022 BNNP Papua mendapatkan target 10 berkas perkara dengan rincian

BNNP Papua 6 berkas, BNNK Jayapura 2 berkas dan BNNK Mimika 2 berkas. Dari target tersebut BNNP Papua mampu mendapatkan realisasi LKN sebanyak 14 berkas dengan rincian BNNP Papua (8 berkas), BNNK Jayapura (2 berkas) dan BNNK Mimika (4 berkas). Indikator kinerja ini melampaui target atau over prestasi karena meningkatnya peredaran gelap narkoba baik jenis ganja maupun Kristal Metamfetamina (sabu-sabu) di tanah Papua. Dari jumlah kasus narkoba yang P21 tersebut masih didominasi kasus ganja dan beberapa ada kasus sabu-sabu (*methamphetamine*) yang berasal dari luar Papua. Berikut rincian kasusnya :

No.	Satker	Target	P-21
1.	BNNP Papua	6 LKN	8 LKN
2.	BNNK Jayapura	2 LKN	2 LKN
3.	BNNK Mimika	2 LKN	4 LKN
<b>Jumlah</b>		<b>10 LKN</b>	<b>14 LKN</b>

#### Laporan Kasus Narkoba (LKN) yang Diselesaikan (P-21) di BNNP Papua tahun 2022

No.	Instansi	Tanggal LKN	Nomor Kasus	Tersangka	Barang Bukti
1.	BNNP PAPUA	05/02/2022	LKN/0002/BRNTS/III/2022/BNNP PROPINSI PAPUA	AGUS TALENG	DAUN GANJA (1598.25 GRAM)
2.	BNNP PAPUA	18/04/2022	LKN/05/BRNTS/VI/2022/BNNP PROPINSI PAPUA	RAHSUL BACHKRI	KRISTAL METAMFETAMINA SHABU (5.15 GRAM)
3.	BNNP PAPUA	19/04/2022	LKN/06/BRNTS/IV/2022/BNNP PROPINSI PAPUA	EKO K PUTRO	KRISTAL METAMFETAMINA SHABU (1.19 GRAM)
4.	BNNP PAPUA	01/06/2022	LKN/08/BRNTS/IX/2022/BNNP PROPINSI PAPUA	YESAYA TEDI AYOMI dan PUA MAIKEL MIRINO	DAUN GANJA (592.22 GRAM)
5.	BNNP PAPUA	06/06/2022	LKN/09/BRNTS/IX/2022/BNNP PROPINSI PAPUA	RICKALDO ZIBERA	DAUN GANJA (289.32 GRAM)
6.	BNNP PAPUA	27/10/2022	LKN/13/BRNTS/XI/2022/BNNP PROPINSI PAPUA	BRETLI EVANDER JULIAN DOOM	DAUN GANJA (6.59 GRAM)

7.	BNNP PAPUA	31/10/2022	LKN/14/BRNTS/XI/2022/BNNP PROPINSI PAPUA	KAMARUDDIN	KRISTAL METAMFETAMINA SHABU (2.00 GRAM)
8.	BNNP PAPUA	14/11/2022	LKN/16/BRNTS/XII/2022/BNNP PROPINSI PAPUA	MAKOR GIA	DAUN GANJA (215.46 GRAM)

**Laporan Kasus Narkotika (LKN) yang Diselesaikan (P-21) di BNNK Jayapura tahun 2022**

No.	Instansi	Tanggal LKN	Nomor Kasus	Tersangka	Barang Bukti
1.	BNNK JAYAPURA	19/10/2022	LKN/758/BRNTS/X/2022/BNNK KABUPATEN JAYAPURA	WAHYUDI	GANJA 11,84 GRAM
2.	BNNP JAYAPURA	26/11/2022	LKN/758/BRNTS/XI/2022/BNNK KABUPATEN JAYAPURA	DUPUWAY HENDRIK AGUSTINUS	GANJA 9,39 GRAM

**Laporan Kasus Narkotika (LKN) yang Diselesaikan (P-21) di BNNK Mimika tahun 2022**

No.	Instansi	Tanggal LKN	Nomor Kasus	Tersangka	Barang Bukti
1.	BNNK MIMIKA	10/03/2022	LKN/01/BRNTS/III/2022/BNNK KABUPATEN MIMIKA	IRWAN SALAM	KRISTAL METAMFETAMINA SHABU (0.54 GRAM)
2.	BNNK MIMIKA	12/03/2022	LKN/02/BRNTS/III/2022/BNNK KABUPATEN MIMIKA	ASWAL	KRISTAL METAMFETAMINA SHABU (41.45 GRAM)
3.	BNNK MIMIKA	27/09/2022	LKN/03/BRNTS/IX/2022/BNNK KABUPATEN MIMIKA	MUH. AKBAR M	KRISTAL METAMFETAMINA SHABU (0.09 GRAM)
4.	BNNK MIMIKA	28/09/2022	LKN/04/BRNTS/IX/2022/BNNK KABUPATEN MIMIKA	ALFA MICHAEL NUSSY	KRISTAL METAMFETAMINA SHABU (0.17 GRAM)

# 12

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang Dimusnahkan* . Sasaran di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	2 Titik Lokasi	2	100 %

Tahun 2022 ini BNNP Papua berhasil memenuhi target 2 titik lahan ganja karena kerja sama dengan TNI Satgas Pamantas RI-PNG Skouw. Dua titik lahan ganja tersebut adalah di Distrik Wolo dan Birime Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Waris Kabupaten Keerom.



*Dokumentasi Pemusnahan Lahan Ganja di Waris Kabupaten Keerom*



Dokumentasi Pemusnahan Lahan Ganja di Distrik Wolo dan Birime Kabupaten Jayawijaya

<b>13</b>	<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika</b>
-----------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	100	100 %

Dari hasil penilaian internal kami untuk Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, Dan Kesehatan Tahanan di BNNP Papua untuk tahun 2022 ini adalah 100. Hal ini karena sudah tertata rapi SOP Wastahti yang mengatur jadwal besuk jenguk tahanan dan rutin bekerja sama dengan bidang rehabilitasi untuk setiap bulannya tahanan melakukan tes antigen Covid-19. Disamping itu tahanan saat mau dipindahkan ke Rutan Lapas Narkotika Doyo dilakukan tes HIV di Rumah Sakit Bhayangkara Abepura.

# 14

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100	100 %

Untuk Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika, menurut hasil penilaian internal kami mencapai nilai 100 persen di tahun 2022. Hal ini karena bidang Wastahti BNNP Papua telah memiliki asset Berangkas untuk penyimpanan BB dan senjata. Sehingga meminimalisir terjadinya kehilangan BB atau penyalahgunaan BB oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu pemasangan CCTV pada tiap ruang tahanan dan sudut lorong pemberantasan juga memberikan nilai tambah dalam penilaian internal ini.

# 15

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Papua dengan Nilai Kinerja Anggaran Mencapai Target* yang dilihat dari aplikasi SMART Kemenkeu.

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Kinerja Anggaran	87 %	84.52	97.1



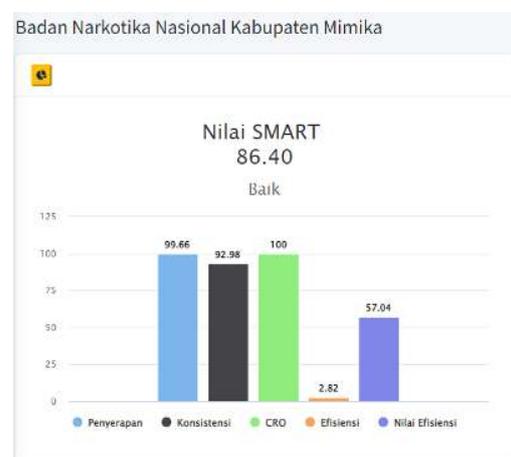
NO.	SATKER	TARGET NILAI KINERJA ANGGARAN (%)	NILAI SMART 2022 (%)
1.	BNNP Papua	87	84.52
2.	BNNK Jayapura	87	81.45
3.	BNNK Mimika	87	86.40

**16** Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi* dengan Nilai Kinerja Anggaran Mencapai Target yang dilihat dari aplikasi SMART Kemenkeu.

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran Mencapai Target	2 BNN Kabupaten/Kota	2	100 %

Target Nilai Kinerja Anggaran di BNNP Papua dan jajarannya yaitu sebesar 87 %. BNNK Jayapura nilai kinerja anggaran tahun 2022 sebesar 81.45 % sedangkan BNNK Mimika sebesar 86.40 %. Dari hasil penilaian tersebut maka target 2 BNNK Kabupaten/Kota yang nilai kinerja anggarannya minimal mencapai 87 % tidak tercapai tahun 2022.



17

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Papua dengan Nilai IKPA Mencapai Target yang dilihat dari aplikasi MONEVPA Kemenkeu.*

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Papua	95 %	96.87 %	101.9

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	063	066	682757	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	73.24	100.00	100.00	100.00	95.48	100.00	100.00	96.87	100%	96.87
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.32	20.00	10.00	10.00	9.55	5.00	25.00			
					Nilai Aspek		86.62			99.10		100.00				

# 18

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA Mencapai Target yang dilihat dari aplikasi MONEVPA Kemenkeu.*

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA Mencapai Target	2 BNN Kabupaten/Kota	2 BNN Kabupaten/Kota	100 %

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua yaitu 96.87 dari target 95 %. Sedangkan untuk BNNK Jayapura nilai IKPA nya sebesar 97.48 dan BNNK Mimika sebesar 96.21 dari target pusat sebesar 95 %. Jadi nilai IKPA keseluruhan BNNP Papua dan jajaran telah melebihi target yang ditentukan oleh BNN RI.

<b>NO.</b>	<b>SATKER</b>	<b>TARGET IKPA (%)</b>	<b>NILAI IKPA 2022 (%)</b>
1.	BNNP Papua	95	96.87
2.	BNNK Jayapura	95	97.48
3.	BNNK Mimika	95	96.21

## **BAB IV PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali guna mengetahui kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governant*) dilingkungan BNN. LAKIP BNNP Papua merupakan hasil kerja BNNP Papua dalam turut serta membangun Negara secara khusus di Provinsi Papua dalam meningkatkan upaya P4GN. Anggaran BNN Provinsi Papua T.A 2022 yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan sebesar **Rp. 7.627.184.000** berasal dari sumber dana APBN dan HIBAH PT. PLN (Persero) Kanwil Papua sebesar **Rp. 80.000.000** dengan *realisasi anggaran sebesar 97.81 % dan realisasi output sebesar 107.55 %*.

### **Saran**

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen (ASN dan POLRI) untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN di Tanah Papua.
2. Perlu adanya pembangunan Kantor sendiri milik BNN Provinsi Papua sehingga dapat menunjang kinerja operasional BNN di Tanah Papua.
3. Perlu adanya fasilitas dan kapasitas lembaga Rehabilitasi milik BNN di Tanah Papua sebagai wujud kepedulian BNN Pusat terhadap BNN Provinsi Papua di ujung Indonesia timur.
4. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
5. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.

## LAMPIRAN 1

### Laporan Realisasi Anggaran dan Output BNNP Papua T.A 2022

KODE	INDIKATOR OUTPUT	ANGGARAN		OUTPUT	
		PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI
3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	26.488.000	26.488.000	5	5
3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	60.000.000	59.710.100	2	2
3248.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	160.435.000	160.235.000	1	1
3251.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	50.000.000	49.680.000	1	1
3256.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	29.150.000	29.120.000	1	1
3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	243.880.000	241.550.698	2	2
3258.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	114.125.000	68.635.000	40	10
3258.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	54.100.000	27.810.000	2	1
3258.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	142.125.000	94.616.000	19	4
3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	26.811.000	26.321.750	10	10
3259.ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	266.260.000	263.783.430	25	25
3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	107.600.000	91.950.100	255	255
3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	121.891.000	112.627.567	12	12
3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.596.248.000	2.576.183.850	12	12
3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	40.205.000	30.765.459	1	1
3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	53.440.000	50.260.000	56	56
3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	77.544.000	56.009.860	2	2
3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.192.859.000	2.093.481.654	14	14
3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	45.000.000	39.370.000	1	1

5936.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	141.565.000	141.505.000	1	1
5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	627.458.000	620.297.998	6	8
5354.QHB	Operasi Bidang Keamanan	450.000.000	441.264.000	2	1
<b>JUMLAH</b>		<b>7.627.184.000</b>	<b>7.301.665.466 ( 95.73 %)</b>	<b>470</b>	<b>425 (107.55 %)</b>

## LAMPIRAN 2

### Laporan Realisasi Anggaran dan Output BNNK Jayapura T.A 2022

KODE	INDIKATOR OUTPUT	ANGGARAN		OUTPUT	
		PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI
3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	40.000.000	40.000.000	5	5
3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	64.000.000	63.795.000	3	3
3256.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	9.650.000	5.483.000	1	1
3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	171.761.000	171.760.000	2	2
3258.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	19.625.000	15.655.000	5	5
3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	13.910.000	11.078.000	5	5
3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	109.606.000	88.845.000	278	278
3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	15.120.000	9.870.000	3	3
3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	87.740.000	79.275.000	12	12
3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	12.450.000	12.060.000	1	1
3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	16.788.000	14.524.000	13	13
3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	32.074.000	17.917.000	2	2
3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.216.501.000	1.183.891.000	14	14
3239.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	35.000.000	35.000.000	2	2
3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20.000.000	15.860.000	1	1

5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	65.000.000	64.850.000	10	10
5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	153.800.000	153.685.000	2	2
<b>JUMLAH</b>		<b>2.083.025.000</b>	<b>1.983.548.000</b> <b>(95.22 %)</b>	<b>359</b>	<b>359</b>

### LAMPIRAN 3

#### Laporan Realisasi Anggaran dan Output BNNK Mimika T.A 2022

KODE	INDIKATOR OUTPUT	ANGGARAN		OUTPUT	
		PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI
3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	40.000.000	40.000.000	5	5
3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	64.000.000	64.000.000	3	3
3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	190.609.000	190.609.000	2	2
3258.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	25.550.000	23.400.000	8	8
3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	12.770.000	12.770.000	5	5
3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	59.170.000	56.308.000	85	85
3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	25.600.000	23.650.000	4	4
3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	76.413.000	69.909.000	12	12
3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	53.052.000	53.052.000	1	1
3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	13.180.000	10.540.000	9	9
3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	62.780.000	56.084.000	2	2
3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.165.153.000	1.143.549.500	13	13
3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15.100.000	13.300.000	1	1
5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	65.000.000	65.000.000	10	10
5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	166.054.000	136.296.000	2	2
<b>JUMLAH</b>		<b>2.034.431.000</b>	<b>1.958.467.500</b> <b>(96.27 %)</b>	<b>162</b>	<b>162</b>